



PROSIDING

Konferensi Nasional Komunikasi

Pers Indonesia dan Dominasi Media Siber

Lynsey Afsari Puteri¹

¹Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Jl. Hang Lekir 1 No. 8, Jakarta – Indonesia

33lindseyafsariputeri@gmail.com

Abstract

This paper discusses the condition of the press in Indonesia which continues to evolve with the changing times. The need for information has become a basic matter for today's society. Information is not only news, but also becomes entertainment and daily complements for those who are almost inseparable from digital devices. Adjusting to the digital era, many media companies are turning to online. Apart from being simpler in terms of marketing and packaging, cyber media tends to be more attractive to people who like instant things. Media companies are competing to present the content as attractive as possible. Cyber media is considered a more flexible media to provide space for the public to be able to discuss any issues (issues), be it political, economic, social and so on, which are currently warming. However, with the flexibility that is underlined as a form of press freedom today, the media must have a greater responsibility. It is not an easy matter to fry an issue through news content in the social, economic sphere, especially practical politics amidst the pluralism of Indonesian society which is increasingly critical and responsive. How then the Indonesian press system must remain a guideline that is absolutely enforced to balance the characteristics of cyber media that are able to quickly accommodate the flow of information, news distractions that are sometimes presented only in fragments, and also the phenomenon of social media as part of cyber media which is now very popular.

Keywords: Mass Communication, Cyber Media, and Indonesian Press

Abstrak

Makalah ini membahas kondisi pers di Indonesia yang terus berkembang. Kebutuhan informasi menjadi suatu hal pokok bagi masyarakat saat ini. Informasi tak sekedar menjadi berita, tetapi juga menjadi hiburan bagi mereka yang hampir tak lepas dari perangkat digital. Menyesuaikan era *digital*, banyak perusahaan media yang beralih ke online. Selain lebih *simple* dalam segi pemasaran dan kemasan, media siber lebih diminati masyarakat yang serba *instant*. Perusahaan media berlomba menyajikan konten semenarik mungkin. Media siber dianggap sebagai media yang lebih lentur memberi ruang pada publik untuk bisa mendiskusikan setiap permasalahan (*isu*) baik itu politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Namun demikian, dengan kelenturan yang digarisbawahi sebagai bentuk kebebasan pers saat ini, media harus memiliki tanggung jawab. Bukan perkara mudah *menggoreng* suatu isu melalui konten berita di ranah sosial, ekonomi, terlebih lagi politik praktis ditengah *pluralisme* masyarakat Indonesia yang semakin kritis serta responsif. Bagaimana kemudian sistem pers Indonesia harus tetap menjadi pedoman yang mutlak ditegakkan mengimbangi ciri media siber yang mampu dengan cepat menampung arus informasi, selentingan berita yang terkadang tersaji hanya sepeinggal, dan juga fenomena media sosial sebagai bagian dari media siber yang kini sangat digandrungi..

Kata Kunci: Komunikasi Massa, Media Siber, dan Pers Indonesia

Copyright © 2020 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. All rights reserved

Pendahuluan

Media sebagai sarana komunikasi massa memiliki peran penting sebagai katalisator ditengah masyarakat dan dianggap sebagai piranti yang sangat kuat (*Lasswell & Marxis*). Namun seiring perkembangan zaman dan semakin beragamnya obyek media, kebenaran atas teori-teori tersebut mulai diragukan. Media massa yang memiliki kedudukan strategis dalam masyarakat harus dilihat melalui dua arah atau timbal balik, apakah media massa membentuk (*moulder*) yang memengaruhi masyarakat, ataukah sebaliknya sebagai cermin (*mirror*) yang dipengaruhi oleh realitas masyarakat. Hal ini berlaku pula pada media yang berkembang saat ini (*tahun 2000-an*), yang umum disebut sebagai era digital.

Kehadiran internet sebagai salah satu identitas era digital-milenial, telah memacu insan pers dalam beraktivitas jurnalistik menjadi lebih efektif dan efisien, utamanya dari sisi penggunaan waktu dan biaya produksi. Hal ini berakibat pada lahirnya inisiatif perubahan atau penambahan format jurnalistik konvensional / tradisional ke format online (*media siber*).

Langkah ini merupakan bentuk adaptasi dan akselerasi, serta sebagai bentuk kelanjutan sebuah *konvergensi industri media*, dimana perusahaan media berupaya melakukan kolaborasi antara penyiaran, penerbitan dan telekomunikasi (*digitalisasi*), guna memastikan produk jurnalistik yang dihasilkan dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan generasi milenial sebagai konsumen atau pasar yang mendominasi data demografi di Indonesia pada khususnya.

Namun, Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AJI) menyatakan, masalah pokok dalam media siber adalah kualitas dan kredibilitas informasi yang sampai ke masyarakat. Masalah kualitas dan kredibilitas ini berawal dari kecenderungan media siber menyampaikan informasi secara cepat sehingga kadang terjebak menyampaikan informasi yang belum final terverifikasi kepada masyarakat luas dan menimbulkan mispersepsi dan misinterpretasi.

Dengan latar belakang yang penulis paparkan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya menjadi bahan untuk pembahasan dan pencarian solusi terkait perkembangan media siber dan sistem pers Indonesia :

- Apakah media siber sebagai sebuah produk jurnalistik dengan format online berbeda dengan produk jurnalistik konvensional/tradisional?
- Apa yang menjadi keunggulan dan sebaliknya menjadi kelemahan dari media siber jika merujuk pada idealnya sebuah media konvensional/tradisional?
- Bagaimana pengaruh media siber yang bersifat sangat lentur dan terbuka di ruang publik ini terhadap penerapan sistem pers di Indonesia dan makna kebebasan pers yang bertanggung jawab sosial?

Makalah ini, diharapkan dapat memberi gambaran, wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia terkait bagaimana sebaiknya menjadi konsumen, produsen ataupun kombinasi keduanya atas keterbukaan media siber, secara bijak dan bertanggung jawab. Masyarakat harus memahami bahwa meski produk media siber tidak berbeda jauh dengan produk jurnalistik konvensional/tradisional diantaranya berita, feature, iklan dan sebagainya, namun ada unsur-unsur khas dari media siber yang terkadang melahirkan produk yang tidak memenuhi kategori dan kode etik jurnalistik serta melanggar regulasi (*undang undang*) penyelenggaraan komunikasi massa yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan konsumen dan kegaduhan ditengah masyarakat sebagai dampak dari mudahnya proses komunikasi terjadi ditengah publik dengan pola penyebaran tak beraturan (*grapevine*) dalam bentuk isu-isu tanpa dilengkapi fakta dan data (*realitas masyarakat*).

Melalui makalah ini juga, diharapkan perusahaan media, insan pers, aktivis jurnalis, masyarakat dan stake holder lainnya, tetap menjunjung tinggi sistem pers yang berlaku di Indonesia tanpa mengurangi upaya-upaya kreatif dan inovasi yang adaptif dan akseleratif menyesuaikan zaman. Perkembangan zaman tidak lantas menggeser nilai dari sistem pers yang berlaku dan senantiasa mengedepankan kaidah (*teori pers*) sebagai pedoman, serta regulasi yang menguatkannya.

Kerangka Teori

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan, penulis menyusun kerangka teori berurutan dalam lingkup batasan konseptual serta tinjauan literatur yang akan diulas kemudian pada bab pembahasan, sehingga terbaca sebagai teori yang terintegrasi satu sama lain, dan dapat dijadikan gambaran utuh menyeluruh sebagai pendekatan yang solutif serta menghasilkan kesimpulan akhir yang mencerahkan.

Komunikasi massa merupakan sebuah bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (media massa) untuk menghubungkan penyampai pesan/berita (komunikator) dengan penerima pesan (komunikan) secara massal, berjumlah banyak, berada di tempat yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek-efek tertentu (Liliweri, 2011:875). Komunikasi massa juga dapat diartikan dalam dua cara yaitu, pertama, komunikasi oleh media, dan kedua, komunikasi untuk massa (Rivers et al., 2008:18).

Massa dalam arti komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang dalam sikap dan perilakunya berkaitan dengan peran media massa. Karena itu, massa di sini menunjuk kepada khalayak, audience, penonton, pemirsa, atau pembaca atau viewers pada media siber. Adapun yang menjadi media antara lain: televisi, radio, internet, majalah, koran, tabloid, buku, dan film. Komunikasi Massa umumnya disampaikan secara searah dan tidak mengenal timbal balik atau feedback.

Devito menjelaskan definisi komunikasi massa secara terperinci yaitu: *First, mass communication is communication addressed to masses, to an extremely large society. This does not mean that the audience include all people or everyone who reads or everyone who watches television; rather it means an audience that is large and generally rather poorly defined. Second, mass communication is communication mediated by audio and or visual transmitter. Mass communication is perhaps most easily and most logically defined by its; television, radio, newspaper. Magazines, films, books, etc .*

Dari teori-teori diatas tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan kepada khalayak luas.

Media Siber

Pada konsep komunikasi massa, salah satu elemen komunikasi massa adalah media, yang terbagi atas media konvensional dan non konvensional atau disebut juga media baru. Teori Media Baru (new media) merupakan adaptasi dan akselerasi terhadap bentuk media di luar lima media massa besar konvensional, televisi, radio, majalah, koran dan film. Media baru tersebut adalah internet (media siber) yang diperkenalkan mulai tahun 1990-an dan semakin berkembang pesat pada era digital tahun 2000-an.

Kehadiran internet sebagai salah satu identitas era digital-milenial, telah memacu insan pers dalam beraktivitas jurnalistik menjadi lebih efektif dan efisien, utamanya dari sisi penggunaan waktu dan biaya produksi. Hal ini berakibat pada lahirnya inisiatif perubahan atau penambahan format jurnalistik konvensional / tradisional ke format online (*media siber*) yang dinyatakan sebagai bentuk media baru (new media).

Layaknya media konvensional / tradisional, komunikasi pada media siber juga memiliki karakteristik tertentu. Seorang pakar, Marc Smith (1995) dalam Nasrullah (2016:80-81) menguraikan beberapa aspek dalam komunikasi di dunia siber, sebagai berikut: a. Komunikasi di dunia siber tidak mensyaratkan keberadaan dan kesamaan antara pengguna (aspatial). Maksudnya ialah sender dan receiver tetap bisa berkomunikasi meski tidak berada di tempat yang sama dan dalam waktu yang sama. Konten pada media siber tidak terbatas waktu dan akan tetap ada sampai kapan pun. b. Komunikasi pada media siber bisa dikondisikan berdasarkan suatu hal, misalnya jadwal. Bergantung pada keinginan komunikator, komunikasi dapat dibuat dalam kondisi ruang dan waktu yang sama (synchronous) atau dibuat berbeda (asynchronous). c. Komunikasi di dalam dunia siber pada kenyataannya dapat terjadi melalui medium teks. Beragam bentuk teks dan juga symbol (icon) menjadi medium yang digunakan untuk mewakili

ekspresi serta intonasi sebagai penentu dalam penyampaian dan penerimaan pesan. d. Komunikasi yang terjadi tidak mensyaratkan adanya kesamaan seperti status atau tingkat pengetahuan (astigmatic). Komunikasi teks pada dunia siber tidak melibatkan visualisasi, sebagaimana di dunia nyata, yang dapat memunculkan interpretasi tertentu, misalnya status sosial, jabatan, maupun yang lainnya.

Media siber/online sebagai bentuk media baru memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam pemberitaannya. John Morrish dan Paul Bradshaw (2012:154) mengemukakan bahwa menulis berita seperti pada media cetak untuk dipublikasikan pada media online bukanlah hal yang tepat. Pendapat ini dipertegas dengan pernyataannya yang berbunyi “*The web is different medium, consumed in different ways and with different qualities*”. Dalam bukunya yang berjudul *Magazine Editing: In Print and Online (2012)*

John Morrish dan Paul Bradshaw memaparkan tentang prinsip dalam menulis berita pada media online yang terkenal dengan singkatan BASIC: Brevity, Adaptability, Scannability, Interactivity and Community & Conservation.

1) Keringkasan. Menulis secara ringkas sangat diperlukan. Kenyataan bahwa aktivitas kehidupan manusia semakin tinggi tingkat kesibukannya membuat setiap orang menyukai hal yang instan dan cepat. Jadi berita yang ringkas dan mudah dipahami akan lebih disenangi oleh khalayak dibandingkan berita yang banyak berbasa-basi.

2) Adaptabilitas. Dengan adanya kemajuan teknologi, komunikator juga dituntut agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta preferensi khalayak. Penggunaan audio, video, atau foto akan lebih baik daripada hanya menggunakan teks dalam pemberitaan.

3) Dapat dipindai. Dalam perangkat teknologi, telah banyak tersedia fitur-fitur yang bisa digunakan untuk mempermudah segala hal. Dapat dipindai merupakan keharusan pada media online untuk memudahkan khalayak.

4) Interaktivitas. Komunikator harus memikirkan cara-cara untuk memancing khalayak agar melakukan sesuatu, bisa berupa like, comment, atau share pada berita yang telah diunggah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melibatkan khalayak pada konten berita.

5) Komunitas dan percakapan. Media massa online memiliki peran yang lebih besar daripada media massa cetak atau media konvensional lainnya yaitu sebagai penjaring komunitas. Komunikator harus membuat pemberitaan yang dapat mengajak khalayak agar turut serta berinteraksi satu sama lain.

Komunikasi Siber dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas manusia. Istilah New Media juga mewakili istilah *new world* karena ia adalah dunia baru yang merepresentasikan semua kegiatan manusia. Bahkan menurut situs ictwatch, aktivitas dunia maya merepresentasikan kegiatan yang ada di dunia nyata. Aktivitas tersebut sekaligus sebagai dampak dari hadirnya dunia nyata yang menunjukkan kebermanfaatannya sisi keberadaan dunia maya.

Media Siber sebagai Konvergensi Industri Media

Prinsip dan aktivitas media siber yang telah diuraikan, secara pasti memberikan kemudahan bagi siapapun penggunaannya untuk saling terhubung kapan pun dan dimana pun secara bersamaan; bahkan media siber mampu mewakili kehadiran dan/atau keterlibatan fisik pada proses komunikasi.

Kelebihan lain yang dimiliki media siber. Salah satunya adalah khalayak tidak lagi menjadi komunikan yang pasif, hanya menerima pesan atau informasi, tetapi juga bersifat aktif. Aktif yang dimaksud dalam hal ini ialah khalayak bisa secara langsung memberikan respon pada pesan-pesan yang diterimanya terlebih sejak kemunculan media baru atau media siber. Ini bermakna bahwa kehadiran media siber memperbarui peran khalayak yang awalnya hanya menjadi objek penerima pesan dan kini menjadi lebih interaktif untuk memberikan feedback (umpan balik) terhadap pesan yang diterimanya.

Menurut Graham et al (2004) yang dikutip oleh Nasrullah (2016:76) konsep interaktif (interactivity) inilah yang sering dijadikan pembeda antara media baru yang digital dan media tradisional yang menggunakan analog (Graham, 2004; Lev Manovich, 2001; Spiro Kioussis, 2002). Adapun menurut John

Vivian (2008: 262-264), dengan kecanggihannya, keberadaan media baru kini dapat melampaui pola penyebaran media tradisional dan sifat interaktifnya dapat pula mengaburkan batas geografis, kapasitas interaksi serta yang paling penting bisa dilakukan secara real time

Hal ini dapat dipandang sebagai konsekuensi positif dari sebuah determinasi teknologi yang ternyata teori terkait ini telah disampaikan oleh *Herbert Schiller (1973)*, bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk cara berpikir, berperilaku dan bergerak dari 1 abad teknologi ke berikutnya.

Kehadiran media siber memberikan banyak penawaran tidak hanya kepada para pelaku industri media tetapi juga khalayak media. Keterlibatan khalayak dalam proses komunikasi massa pada media siber memberikan beberapa implikasi yang cukup penting seperti perubahan eksistensi media konvensional. Bahkan, media siber memberikan ruang bagi siapapun untuk turut serta memproduksi hingga menyebarluaskan informasi kepada khalayak. Dengan kata lain, khalayak yang pada umumnya berperan sebagai konsumen pesan kini dapat pula berperan sebagai produsen. Fenomena inilah yang disebut dengan jurnalisme warga (*citizen journalism*). Segala kemudahan yang ditawarkan oleh media online membuat masyarakat beralih dari penggunaan media konvensional.

Melalui internet, audiens dapat mengakses beragam informasi secara mudah melalui komputer, laptop, maupun gadget tanpa ada batasan waktu dan tempat, bahkan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Sebuah kelebihan yang tentu tidak akan ditolak oleh masyarakat. Meski tidak secara langsung menggantikan peran media konvensional, media siber tetap menjadi ancaman.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2005, pengguna internet di Indonesia tadinya baru 3.34% persen. Jumlah tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 35,64% pada tahun 2014. Hal ini berarti bahwa dalam kurun waktu sembilan tahun terjadi peningkatan sepuluh kali lipat.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa media konvensional dan media digital mengalami persaingan yang sangat ketat. Media online dengan segala kelebihannya tidak hanya bersaing dengan media tradisional saja, melainkan juga dengan sesama media online. Hal ini dibuktikan dengan angka pertumbuhan media online di Indonesia sudah mencapai 43.000 lebih, seperti yang diungkapkan oleh Dewan Pers dalam Konvensi Nasional Media Massa 2018. Kenyataan ini menegaskan bahwa media online pun harus memiliki strategi tertentu untuk meningkatkan serta mempertahankan pembaca atau visitor. Keharusan ini disebabkan oleh kebutuhan lembaga media dalam menarik iklan agar tetap bisa bertahan. Iklan dan penjualan (produk) media, baik itu edisi terbitan maupun program, merupakan sumber pendanaan suatu lembaga media. Jika jumlah audiens yang menyaksikan, membaca, atau mendengar sebuah produk media semakin bertambah, maka produk media tersebut pun akan secara otomatis semakin populer.

Nasrullah (2016:45) mengutip Albarrran (1996:13-15) menyatakan bahwa efek kepopuleran inilah yang dapat menarik minat korporasi atau perusahaan untuk memasang iklan pada media tersebut. Nurudin (2013:97) dalam bukunya mengutarakan bahwa sifat komunikator dalam komunikasi massa memang mencari keuntungan. Bukan semata-mata mengejar keuntungan, namun orientasi keuntungan tersebut yang menjadi dasar pembentukan lembaga media. Media massa membutuhkan keuntungan untuk menjaga keberlangsungan lembaga itu sendiri. Maka, tidak heran jika sebuah lembaga media memang berorientasi profit dengan cara memburu kepopuleran di antara khalayak demi menarik iklan yang masuk.

Penulis telah menyebutkan bahwa Pers / Media Massa adalah lembaga dan saluran untuk menjalankan fungsi komunikasi massa. Rowland Lorimer dan Paddy Scannel (1994: 22) mendefinisikan media massa secara lebih luas dengan mengaitkan fungsi dan peran media. Media massa sebagai alat komunikasi massa, digambarkan oleh Loriel dan Paddy Scannel dengan elemen-elemen (fungsi dan peran) seperti dikemukakan oleh McQuail (1993) sebagai berikut:

- Media massa merupakan aktifitas komunikasi massa yang berorientasi berdasarkan isi media;

- Media massa menggunakan konfigurasi teknologi (televisi, radio, videoteks, majalah dan buku);
- Sistem media massa, apakah formal atau non-formal (menyangkut sistem media, kantor pusat, sistem publikasi dan sebagainya);
- Dioperasikan berdasarkan ketentuan hukum dan kesepakatan antara para professional dan praktisi, khalayak dan kecenderungan sosial masyarakat;
- Diterbitkan oleh kelompok yang terdiri atas: Pemilik modal, redaktur, distributor, periklanan dan pelanggan;
- Menyampaikan informasi, hiburan, pikiran-pikiran dan simbol-simbol;
- Ditujukan kepada audience yang banyak (Rowland, 1994: 25).

Metode Penelitian

Dalam menyusun makalah ini, penulis menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan data naratif, namun ada data numerik yang sifatnya hanya sebagai pendukung kecil. Metode penulisan dilakukan secara deskriptif, eksperimental dan fenomenologi.

Hasil Penelitian

Secara umum ada 4 (empat) teori pers yang dianut oleh negara-negara di dunia, yakni, otoritarian, libertarian, tanggung jawab sosial, dan komunis/Soviet Russian. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Teori pers otoritarian lahir bersamaan dengan ditemukannya mesin cetak modern di abad 16-17. Otoritarian banyak dipakai oleh negara-negara barat kala itu, seperti Inggris, Perancis, dan negara eropa barat lainnya. Dalam sistem otoritarian, media massa/pers bukan sebagai alat control pemerintah tetapi sebagai instrumen pendukung untuk mencapai tujuan-tujuan negara. Oleh karena itu, pers dalam otoritarian harus mendukung setiap kebijakan negara, bukannya menghasut masyarakat untuk melakukan pemberontakan. Teori ini tanpa disadari banyak digunakan oleh negara-negara maju sekarang ini seperti Portugal, Cina, Spanyol dan banyak negara di asia dan amerika selatan. Analisis dari teori ini adalah bahwa untuk bisa sejajar dengan negara-negara maju, sistem otoritarian cocok untuk digunakan.

Plato sebagai salah satu dari pelopor teori otoritarian beranggapan bahwa negara akan maju apabila dipimpin dan dipegang oleh orang-orang bijak, seperti hakim. Karena apabila menggunakan sistem demokrasi atau musyawarah maka perpecahan itu rentan terjadi, sehingga tujuan-tujuan negara itu susah dicapai karena sulitnya menyatukan suara itu sendiri. Jadi, harus ada orang yang bijak yang dijadikan pemimpin dalam membuat keputusan untuk kepentingan bersama sehingga tujuan negara tercapai.

Kita selalu didoktrin bahwa teori pers otoritarian ini adalah pengekangan terhadap kebebasan pers. Tetapi, Pada dasarnya dalam teori pers otoritarian ini pers bukan dikekang tetapi diawasi, dan bentuk pengawasannya itu dilakukan oleh masyarakat, yang diwakili oleh lembaga yaitu pemerintah. Jadi, kita sebagai masyarakat tidak perlu takut mengenai pers yang akan bertindak sebebaskan-bebasnya dalam membuat pemberitaan dan berlaku kapitalis, karena kalau mereka melanggar norma-norma di masyarakat maka sudah ada hukum dan aturan yang jelas yang mengawasinya. Dan kemungkinan terjadi *chaos* dimasyarakat itu kecil, karena penerapan hukum dinegara yang menganut sistem otoritarian ini sangat dijunjung tinggi. Sehingga Keamanan dan kedaulatan negara akan terjamin.

Kita selalu dihasut oleh negara Adidaya seperti Amerika Serikat bahwa pers yang bebas membuktikan negara itu maju. Tetapi pada kenyataannya, banyak masalah-masalah dan rahasia negara yang terbongkar keluar negeri karena persnya yang terlalu bebas. Sebagai contoh, ketika Amerika Serikat perang dengan Vietnam banyak rahasia-rahasia negara yang tersebar keluar, sehingga Amerika kalah waktu itu dalam perang Vietnam. Itu hanya salah satu contoh dari buruknya pers yang terlalu bebas. Mungkin saat ini banyak negara di dunia menganut sistem libertarian. Tetapi dalam prakteknya mereka lebih cenderung memakai sistem otoritarian. Kenapa? Karena mereka tahu kalau sistem libertarian ini sulit diterapkan di

sebuah negara apabila negara itu ingin menjadi negara maju. Karena setiap kebijakan negara yang baru dirumuskan saja sudah diprotes oleh pers yang mengaku mewakili masyarakat, karena menurut mereka itu tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Seolah-olah pers lebih ahli dalam membuat kebijakan negara. Makanya tidak dapat dipungkiri lagi sistem otoritarian ini merupakan salah satu sistem yang layak diterapkan apabila negara tersebut ingin menjadi negara yang maju.

Filsafat teori pers libertarian menganggap bahwa manusia makhluk rasional dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Sehingga apabila manusia itu dikekang dengan aturan-aturan dan hukum yang ketat, maka manusia tidak akan bisa menjadi manusia maju.

Teori libertarian hadir karena melihat teori otoritarian sudah tidak cocok lagi digunakan dan banyaknya negara yang hancur akibat menganut sistem otoritarian, terutama pada akhir abad XIX. Dalam sistem otoritarian, negara terlalu mengekang pers dan masyarakatnya. Sehingga muncul gejolak-gejolak pemberontakan dari masyarakat untuk bebas dan tidak terikat lagi dengan aturan-aturan yang ketat yang malah menyengsarakan mereka. Karena dalam sistem otoritarian ini, masyarakat dijadikan alat untuk melenggangkan kekuasaan yang sudah ada.

Dalam otoritarian, hak untuk memiliki media massa dikeluarkan atas izin pemerintah melalui yang namanya hak "paten". Hak paten ini bisa didapatkan apabila kita memiliki kedekatan dengan penguasa atau pemerintah. Hal ini malah akan menimbulkan yang namanya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) karena hanya kerabat dan anggota keluarga dari penguasa atau pemerintahlah yang bisa memiliki media massa. Ini pernah terjadi di Indonesia ketika zaman orde baru, dimana media massa banyak dimiliki oleh kerabat dan anggota keluarga Soeharto/cendana. Seperti TPI yang dulu dimiliki oleh Siti Hardijanti Rukmana, anak pertama Soeharto. Sedangkan, dalam libertarian semua orang berhak mendirikan media massa asalkan mereka memiliki modal. Sehingga praktek KKN sulit dilakukan. Dan orang yang memiliki kemampuan mencari untung yang kuatlah yang akan bertahan. Proses persaingan yang kuat dan bersih inilah yang akan membuat negara menjadi maju. Karena semua orang berusaha untuk menjadi terbaik dalam setiap usahanya.

Salah satu yang sangat dijunjung tinggi dalam pers libertarian adalah HAM, terutama mengenai kebebasan berpendapat. Masyarakat bebas mengungkapkan pendapatnya terutama untuk kemajuan negara. Karena yang mengetahui masalah sebenarnya di masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, bukan pemerintah. Karena pemerintah selama ini tidak pernah melihat permasalahan yang sebenarnya di masyarakat. Pemerintah hanya bisa melihat permasalahan di masyarakat itu dari luarnya saja.

Hal yang terpenting dalam sistem libertarian adalah kebebasan berpendapat. Ini berkaitan dengan hak memperoleh pendidikan yang layak untuk masyarakat. Karena dalam sistem otoritarian, selama ini masyarakat lebih banyak dibodohi oleh pemerintahnya. Sehingga mereka tidak bisa mengungkapkan pendapatnya dan selalu kalah dalam berargumentasi dengan pemerintah. Terbukti dari peran masyarakat yang minim bahkan tidak ada dalam setiap membuat kebijakan-kebijakan negara. Kenapa Amerika Serikat bisa sukses menjadi negara adidaya dengan demokrasi dan sistem libertariannya? Karena mereka menyediakan pendidikan yang layak dan baik kepada masyarakatnya. Sehingga masyarakatnya bisa turut dalam memberikan kontribusi yang nyata dalam membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat.

Pendidikan yang dimaksud disini, tidak hanya berupa pendidikan di sekolah saja. Tetapi pendidikan dalam arti yang luas. Seperti informasi yang bisa didapatkan dimana saja tanpa perlu melewati sistem penyensoran. Contohnya buku dan film. Lewat buku dan film, masyarakat bisa memperoleh ilmu yang baik dan bermanfaat. Dan demokrasi akan berjalan baik apabila masyarakatnya dilengkapi pula oleh kemampuan demokrasi yang baik pula. Dan kemampuan demokrasi yang baik itu bisa didapatkan lewat pendidikan yang baik.

Pada dasarnya Tanggung jawab sosial hampir mirip dengan libertarian, dimana filsafat dasar yang dianutnya adalah manusia adalah makhluk rasional dan memiliki akal. Jadi setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri dan memiliki kebebasan dalam berpendapat. Tetapi, kebebasan seperti apa? Apakah

kebebasan untuk bisa mencela orang lain? Kebebasan membuka rahasia negara kepada negara lain? Kebebasan berekspresi hingga merugikan orang lain? Disinilah teori pers tanggung jawab sosial hadir untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam teori libertarian.

Dalam teori tanggung jawab sosial pers tetap mempunyai kebebasan dalam membuat berita dan informasi kepada masyarakat. dan juga pers/media massa boleh dimiliki oleh siapapun tanpa harus memperoleh izin berupa hak “paten” dari pemerintah. Tetapi kebebasan pers itu tetap harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. jangan sampai pers malah membuat negara menjadi *chaos* dengan pemberitaannya yang bisa menghasut kelompok-kelompok masyarakat. Pers harus mempunyai rem sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri dari dalam. Rem itu berupa kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan aturan-aturan yang menjadi batasan-batasan pers dalam membuat berita. Sehingga pers bisa bertanggung jawab kepada masyarakat dalam setiap pemberitaan yang mereka buat. Pers tidak hanya membuat informasi yang menghibur dan mementingkan kepentingan ekonominya saja, tetapi pers/media massa juga harus bisa mencerdaskan bangsa dengan pemberitaan yang “baik”

Dalam teori libertarian, masyarakat tidak bisa memprotes apabila ada pemberitaan atau program acara yang merugikan masyarakat. karena dalam libertarian pers/media massa dilindungi oleh tameng yang bernama “kebebasan berekspresi”. Tetapi, dalam teori tanggung jawab sosial masyarakat mempunyai hak untuk memprotes bahkan menghukum pers/media massa yang merugikan masyarakat. sebagai contoh di Indonesia seperti sekarang ini. Masyarakat bisa memprotes atau menghukum media massa yang membuat pemberitaan atau acara yang tidak baik. Protes itu bisa dilakukan secara langsung dengan melayangkan surat protes kepada media massa yang bersangkutan, atau dengan melapor kepada lembaga yang bersangkutan seperti dewan pers dan KPI. Jadi, peran media, negara, dan masyarakat saling berkesinambungan untuk kemajuan negara.

Dalam hal ini teori tanggung jawab sosial sudah beda satu tingkat diatas libertarian, karena medianya tidak hanya memberikan hiburan dan informasi saja tapi juga turut mencerdaskan masyarakat. seperti tulisan sebelumnya mengenai libertarian, Demokrasi akan berjalan baik apabila masyarakatnya dilengkapi pula oleh kemampuan demokrasi yang baik pula.

Teori tanggung jawab sosial berasumsi bahwa media massa termasuk didalamnya adalah media siber, merupakan media atau frekuensi milik public. Seperti di Indonesia yang sudah mempunyai undang-undang penyiarnya mengenai frekuensi public. Jadi, tanggung jawab sosial menjadi fondasi utama dalam membentuk negara demokrasi yang baik.

Teori pers soviet komunis hampir sama dengan otoritarian dimana pers dijadikan alat untuk mencapai tujuan negara. Dalam membuat kebijakan negara ini, soviet komunis tidak menggunakan sistem musyawarah karena hanya akan memperlambat proses mencapai keputusan. Proses pembuatan keputusan cukup hanya dilakukan oleh pemerintah saja, karena pemerintah merupakan perwakilan rakyat. Dalam soviet komunis, rakyat merupakan kekuasaan tertinggi. Rakyat ini diwakilkan oleh sebuah organisasi yang disebut dengan partai. Partai ini yang nantinya akan memimpin sebuah negara, dimana negara itu merupakan wadah sementara untuk mencapai komunisme, yaitu masyarakat tanpa kelas tanpa negara. Teori pers komunis merupakan pers yang bebas dari kapitalis. Mereka bebas memberitakan informasi apa saja selama tidak merugikan masyarakat yang dalam hal ini mengancam keamanan negara. Karena pada dasarnya pers itu memang harus independen. Independen disini artinya memihak kepada rakyat, bukan kepada pemilik. Perlu diingat lagi bahwa rakyat merupakan kekuasaan tertinggi di negara yang menganut sistem komunis.

Dalam soviet komunis ini kesejahteraan rakyat sangat diperhatikan, khususnya kaum proletar. Mereka sangat membenci kapitalisme dan imperialisme. Karena kapitalisme dan imperialism yang merupakan hasil dari sistem libertarian hanya bisa membuat rakyat sengsara. Mereka hanya mementingkan kaum pemilik modal saja. Oleh karena itu soviet hadir agar memperjuangkan nasib rakyat terutama kaum

proletar agar bisa sejahtera, dan tujuan akhir mereka adalah masyarakat tanpa kelas. Karena apabila masyarakat sudah dikelas-kelaskan akan menimbulkan kecemburuan sosial dan *chaos* dimasyarakat. Dan ini akan menimbulkan perang yang tiada akhir. Jadi, apabila negara ingin aman dan rakyat sejahtera maka soviet komunis ini cocok untuk diterapkan, khususnya di negara-negara berkembang.

Sistem Pers Indonesia

Pers setiap negara berbeda-beda, ada yang yang menjadi alat negara untuk mencapai tujuan negara, ada juga yang menjadi alat kontrol negara. Semua itu tergantung dari sistem sosial yang dianut negara tersebut, terutama sub-sistem ideologi negara dan politik.

Dari empat teori pers yang tersaji diatas, maka teori pers yang cocok diterapkan di Indonesia adalah teori tanggung jawab sosial. Hal ini berdasar keputusan Dewan Pers No. 79/XIV/1974, bahwa yang berlaku di Indonesia adalah Sistem Pers Pancasila yang terikat pada ideologi dasar negara (Pancasila) dan falsafah budaya masyarakat.

Indonesia sudah mempunyai fondasi yang kuat dalam menerapkan teori ini seperti UUD yang mengatur mengenai kebebasan berpendapat, UU pers dan penyiaran hingga lembaga negara seperti dewan pers dan KPI. Kebebasan pers dijamin oleh undang-undang pasal 28 UUD 1945. Dijelaskan juga bahwa pers harus sesuai dengan hakikat demokrasi Pancasila yang tersebut dalam UU Pokok Pers No. 11 tahun 1982.

Tanggung jawab sosial cocok diterapkan di Indonesia karena masyarakat Indonesia yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan golongan. Sehingga peluang terjadinya perpecahan di masyarakat sangat besar. Tanggung jawab sosial hadir untuk menengahi semua perbedaan yang ada di masyarakat itu. sehingga demokrasi yang dipakai Indonesia ini bisa berjalan baik. Dan semua aspirasi masyarakat dari berbagai macam lapisan bisa tersalurkan lewat pers tanggung jawab sosial. Karena pers dalam tanggung jawab sosial selain sebagai alat control negara juga sebagai medium aspirasi dari rakyat kepada pemerintah maupun sebaliknya sebagai alat penyampai kebijakan dari pemerintah kepada rakyat.

Jika dikaitkan dengan penggunaan media siber yang semakin mendominasi dan cenderung bersifat cepat dan bebas dalam akses dan penyebarannya, tentu saja teori tanggung jawab sosial sangat tepat diterapkan, guna menjadi penjaga gawang (*gatekeeper*) dan regulator yang akan senantiasa mengontrol pers yang bertanggungjawab. Insan pers atau aktgivis jurnalistik dan masyarakat, utamanya generasi milenial yang identik dengan karakter kreatif, kritis, inovatif dan responsif tetap mendapat ruang untuk berekspresi dan saling membagi informasi seluas-luasnya, namun mengedepankan tanggung jawab sosial dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila

Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan yang diuraikan pada makalah ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai jawaban dari rumusan masalah:

Produk media siber tidak berbeda jauh dengan produk jurnalistik konvensional/tradisional, diantaranya berita, feature, iklan dan sebagainya,

Perkembangan media siber di Indonesia sangat pesat dan memberi dampak dua sisi, positif sebagai keunggulan, maupun negatif sebagai kelemahan, yakni :

Keunggulan : Media siber membuka ruang dan kesempatan yang luas bagi masyarakat, insan pers dan stake holder lainnya dalam berkarya, berkreasi, serta melakukan aktivitas-aktivitas adaptasi dan akselerasi sosial ekonomi budaya dan politik.

Media siber memiliki keterbatasan durasi dan kapasitas ruang saji sehingga informasi yang disampaikan maupun diterima menjadi terpotong-potong dan menimbulkan misspersepsi maupun missinterpretasi.

Sifat media siber yang lentur dan terbuka diruang publik tak lantas mengurangi makna kebebasan pers yang bertanggung jawab di Indonesia. Lentur tak berarti boleh dipatahkan, dan terbuka tak berarti tanpa batas toleransi dan kesantunan serta perlindungan privasi. Regulasi sistem pers di Indonesia yang tegas dalam UUD 1945 dan UU Pokok Pers, harus dipatuhi dan menjadi pedoman dan rambu-rambu bagi pengguna media siber.

Daftar Pustaka

- Abraham, F. Z. (2014). Pemanfaatan Media Online Terhadap Interaksi Sosial Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*
- Admin DSLA (17 April). *UU ITE: Pasal-pasal dan Mereka yang Terjerat*, <https://www.dslalawfirm.com/uu-ite/>
- Aguswandi, A., Cangara, H., & Sultan, M. (2019). Konstruksi Pemberitaan Partai Perindo di iNews TV. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(2), 142-154. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v1i2.19>
- Aziz, Abd (2017). *Sistem Teori dan Orientasi Pers*. <https://kumparan.com/mediamadura/sistem-teori-dan-orientasi-pers/full>
- Bill Kovach dan Tom Rosenstiel., *The Element of Journalism*. ed., Stanley, Penerjemah; Yusi A. Pareanom, (Jakarta; Institut Studi Arus Informasi, 2004), h. 39
- Badri, Muhammad (2017) *Inovasi Jurnalisme Data Media Online di Indonesia*.
- Cahyono, Anang Sugeng. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*
- Heru Margianto dan Asep Syaefullah, *Media Online; Antara Pembaca, Laba, Etika dan Problematika*
- Hapsari, P. (2019). Akun Instagram @Nurhadi_Aldo: Kritik Fenomena Sosial. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(1), 43-47. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v1i1.5>
- Hasanti, I. (2021). Hambatan Komunikasi Event Project Team dengan Account Executive pada Perusahaan Jasa Event Organizer Twisbless. *Journal of Servite*, 1(2), 37 -48. <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/102001220195>
- John Vernon Pavlik, *Journalism and New Media* (New York: Columbia University Press, 2001), h. 3
- Kholisoh, N. (2021). Penyuluhan Literasi Media tentang Dampak Pornografi bagi Remaja Badui Luar di Desa Kanekes, Lebak - Banten. *Journal of Servite*, 1(2), 20 - 29. <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/102001220193>
- Lestari, P., Ritonga, R., Ruliana, P., & Barus, C. C. B. (2020). Disaster communication uses field training exercise simulation as an important aspect of disaster risk reduction. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(1).
- Mahrani, M., Ruliana, P., & Ritonga, R. (2020). Building the Image of Semarang City through Motocross World Championship. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 5(2), 243-253. doi:<https://doi.org/10.25008/jkiski.v5i2.423>
- Natalia, E. (2020). Membangun Kesadaran Diri Generasi Muda akan Budaya Positif Melal Penggunaan Media Sosial. *Journal of Servite*, 2(2), 20 - 31 <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/102002220203>
- Nurhajati, L., & Wijayanto, X. (2019). Kepemilikan Media dan Isi Pemberitaan Koran Tempo. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(1), 1-14. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v1i1.1>
- Nurlatifah, Mufti (2018). *Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital*. <http://202.0.92.5/isoshum/profetik/article/view/1289>
- Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*. (Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Ostini & Fung (2002). *Beyond the Four Theories of the Press: A New Model of National Media Systems*
- Pangaribuan, O., & Irwansyah, I. (2019). Media Cetak Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(2), 119-130. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v1i2.11>
- Praktik Jurnalisme Online di Indonesia (Jakarta: Divisi Penyiaran dan Media Baru AJI Indonesia, 2010), h. vi 2 J.

- Puspitasari, W., & Istiyanto, S. (2019). Pemberitaan Bias Gender dalam Kasus Prostitusi Online. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(1), 76-81. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v1i1.9>
- Romli, Asep Syamsul M (2018). *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*.
- Ritonga, R., Murwani, E., & Ritonga, S. (2017). Gender Awareness of Maria Hartiningsih as Kompas Reporter. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 2(2), 82-91. doi:<https://doi.org/10.25008/jkiski.v2i2.102>
- Ritonga, R., Nugroho, E., & Handoko, D. (2019). Struggle of meaning and the Jokowi myth in the 2018 asian games opening video. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(1).
- Ritonga, R., & Syahputra, I. (2019). Citizen journalism and public participation in the era of new media in Indonesia: From street to tweet. *Media and Communication*, 7(3), 79-90.
- Sahputra, D. (2020). Kompetensi Wartawan dalam Liputan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 2(2), 97-105. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v2i2.42>
- Shalihah, Nur Fitriatus (2020). *Polri: Penyebar Hoaks Corona Bisa Kena UU ITE, Terancam 6 Tahun Penjara*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/17/121703965/polri-penyebar-hoaks-corona-bisa-kena-uu-ite-terancam-6-tahun-penjara?page=all>
- Sunuantari, M., & Gunawan, I. (2021, January 16). Diseminasi Informasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi. *Journal of Servite*, 2(1), 47 - 57. <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/102002120205>
- Surbakti, Dahlan (2015). *Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya*.
- W. H. Chun, dan T. Keenan, *New Media, Old Media; a History and Theory Reader* (New York: Routledge, 2006), h. 1
- Wahdaniah, I., Toni, A., & Ritonga, R. (2020). Makna Logo Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 3(01), 67-74
- Wirasahidan, J. (2019). Brand Community: Pola Komunikasi dalam Menjaga Keutuhan Kelompok. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(2), 82-90. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v1i2.12>
- Yanuar, D. (2020). Peran Media Baru dalam Mengubah Perilaku Perokok Tembakau ke Rokok Elektrik di Kota Banda Aceh. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 2(1), 62-77. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v2i1.31>